

CEGAH KORUPSI SEJAK DINI: INISIATIF GURU DAN STAF KARYAWAN UNTUK SEKOLAH YANG BERSIH

Zainudin Hasan¹, Benedictus Rangga Saputra Wibowo²
Universitas Bandar Lampung
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email : ranggaajha8@gmail.com¹
zainudinhasan@ubl.ac.id²

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat pembangunan dan menggerogoti nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pencegahan korupsi sejak dini sangat penting, khususnya di lingkungan pendidikan, karena sekolah adalah tempat utama pembentukan karakter generasi muda. Guru dan staf karyawan sekolah memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi serta menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran pada siswa. Artikel ini mengkaji inisiatif yang dapat dilakukan oleh guru dan staf sekolah untuk mewujudkan sekolah yang bersih dan transparan. Beberapa inisiatif yang diusulkan meliputi penerapan pendidikan karakter berbasis antikorupsi, transparansi dalam pengelolaan dana sekolah, pelatihan antikorupsi untuk guru dan staf, penguatan sistem pengawasan internal, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta melibatkan siswa dalam kampanye antikorupsi. Setiap tindakan ini bertujuan untuk menciptakan budaya sekolah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan penerapan inisiatif-inisiatif ini, sekolah diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam upaya pencegahan korupsi di masa depan, sekaligus membangun generasi yang memiliki integritas tinggi dan komitmen untuk melawan segala bentuk praktik koruptif. Implementasi yang konsisten dari langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat budaya integritas di kalangan pendidik, staf, dan siswa.

Kata Kunci : Pencegahan Korupsi, Pendidikan Antikorupsi, Guru, Staf Karyawan, Integritas, Sekolah Bersih.

ABSTRACT

Corruption is one of the main problems that hinders development and undermines moral values in society. Preventing corruption from an early age is very important, especially in the educational environment, because schools are the main place for forming the character of the younger generation. Teachers and school staff play a crucial role in creating an environment free from corrupt practices and instilling the values of integrity and honesty in students. This article reviews initiatives that teachers and school staff can take to create clean and transparent schools. Some of the proposed initiatives include implementing anti-corruption-based character education, transparency in the management of school funds, anti-corruption training for teachers and staff, strengthening the internal monitoring system, applying strict sanctions for violations, and involving students in anti-corruption campaigns. Each of these actions aims to create a school culture that is based on the principles of honesty,

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

transparency and accountability. By implementing these initiatives, it is hoped that schools can become effective agents of change in efforts to prevent corruption in the future, as well as building a generation that has high integrity and a commitment to fighting all forms of corrupt practices. Consistent implementation of these measures is expected to strengthen cultural integrity among educators, staff, and students.

Keywords: *corruption prevention, anti-corruption education, teachers, staff, integrity, clean schools.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencegahan korupsi telah menjadi salah satu isu nasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk dunia pendidikan. Korupsi tidak hanya merugikan sektor ekonomi dan politik, tetapi juga menciptakan budaya ketidakjujuran yang dapat merusak moral bangsa. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi perlu diterapkan sejak dini, terutama di lingkungan sekolah yang menjadi tempat pembentukan karakter generasi muda. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk mengkaji dan menguraikan pentingnya peran guru dan staf karyawan dalam mempromosikan nilai-nilai integritas dan membangun sekolah yang bersih dari segala bentuk penyimpangan. Sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas, dan salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Guru dan staf karyawan sebagai aktor utama dalam lingkungan pendidikan harus memainkan peran kunci dalam menciptakan budaya anti-korupsi di sekolah. Hal ini menjadi penting karena sekolah adalah tempat di mana siswa pertama kali diperkenalkan dengan nilai-nilai sosial yang akan membentuk perilaku mereka di masa depan.¹

Meskipun demikian, salah satu permasalahan yang sering muncul adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi di kalangan pendidik dan staf sekolah. Banyak yang masih menganggap bahwa korupsi hanya relevan di sektor pemerintahan atau bisnis, padahal perilaku tidak jujur juga dapat berkembang di lingkungan sekolah. Manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, atau tindakan tidak transparan lainnya dapat menjadi cikal bakal korupsi di kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kesadaran bahwa setiap individu di lingkungan sekolah, baik guru maupun staf karyawan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas dan transparansi. Pendidikan antikorupsi bukan hanya tentang mengajarkan teori kepada siswa, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas melalui contoh nyata. Guru dan staf karyawan harus menjadi teladan bagi siswa dalam hal integritas. Selain itu, pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga siswa dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Langkah ini penting untuk mencegah munculnya perilaku yang tidak etis di kalangan siswa maupun tenaga pendidik.²

Integritas di lingkungan sekolah tidak hanya ditunjukkan melalui perilaku individu, tetapi juga melalui kebijakan dan sistem yang diterapkan. Salah satu inisiatif penting yang dapat diambil oleh sekolah adalah membentuk sistem pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana dan anggaran sekolah. Transparansi dalam pengelolaan dana, terutama yang berkaitan dengan dana bantuan dari pemerintah atau sumbangan masyarakat, dapat mencegah munculnya penyimpangan dan memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas penggunaannya. Di sisi lain, masih banyak sekolah yang belum memiliki program yang jelas dalam hal pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan bagi guru dan staf karyawan mengenai pentingnya pencegahan korupsi di lingkungan

¹ Rina Oktaviani, Peran Guru dalam Membangun Karakter Siswa, Jurnal Pendidik dan Pembelajaran, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 55-70

² Zainudin Hasan, Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah: Membangun Kesadaran dan Integritas, Jurnal Pendidikan dan Etika, vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 115-130

pendidikan. Padahal, dengan pemahaman yang lebih baik, mereka bisa menjadi garda terdepan dalam menciptakan budaya bersih dan berintegritas di sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang melibatkan seluruh elemen sekolah agar mereka dapat berperan secara maksimal dalam upaya pencegahan korupsi.³

Sebagai bagian dari upaya ini, guru dan staf karyawan juga perlu didorong untuk membuat inisiatif-inisiatif kreatif dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan sekolah. Misalnya, melalui lomba-lomba yang mempromosikan integritas, diskusi kelas tentang bahaya korupsi, atau penyelenggaraan seminar antikorupsi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah-langkah ini akan membantu siswa lebih memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Namun, inisiatif dari guru dan staf karyawan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah dan pihak manajemen. Mereka harus mampu menyediakan kebijakan dan regulasi yang mendukung terciptanya sekolah yang bersih dan bebas dari korupsi. Selain itu, kepala sekolah perlu memastikan bahwa semua kebijakan diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus yang dapat merusak prinsip keadilan dan integritas.

Jurnal ini juga ingin menyoroti peran penting kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan adanya sinergi yang baik antara ketiga pihak tersebut, pendidikan antikorupsi dapat berjalan lebih efektif. Masyarakat dan orang tua dapat mendukung upaya sekolah dengan memberikan pengawasan dan masukan, sementara sekolah berperan sebagai pelaksana utama dalam menanamkan nilai-nilai integritas kepada siswa. Dengan demikian, penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran guru dan staf karyawan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan sekolah. Diharapkan, melalui jurnal ini, para pendidik, pengambil kebijakan, dan seluruh pihak yang terkait dapat lebih memahami pentingnya pendidikan antikorupsi dan bagaimana menerapkannya secara efektif untuk menciptakan sekolah yang bersih dan berintegritas.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran guru dan staf karyawan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari praktik korupsi?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan kebijakan pencegahan korupsi, dan bagaimana cara mengatasinya?

II. PEMBAHASAN

Peran guru dan staf karyawan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari praktik korupsi

1. Kesadaran dan Pendidikan Antikorupsi

Guru dan staf karyawan memiliki peran kunci dalam membangun kesadaran tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah. Dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada siswa, mereka dapat menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sejak dini. Pendidikan ini tidak hanya mencakup teori, tetapi juga praktik nyata yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa akan lebih memahami dampak negatif dari korupsi dan pentingnya menjaga integritas dalam semua aspek kehidupan.

2. Inisiatif Kreatif dan Keterlibatan Siswa

Peran guru dan staf karyawan juga mencakup pengembangan inisiatif kreatif untuk melibatkan siswa dalam upaya pencegahan korupsi. Mereka dapat mengadakan lomba-lomba, diskusi kelas, atau seminar tentang antikorupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti orang tua dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar tentang pentingnya integritas dalam situasi

³ Siti Aisyah dan Budi Santoso, Peran Kebijakan dan Inisiatif Kreatif dalam Pencegahan Korupsi di Sekolah, *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, vol. 10, no. 1, 2023, hlm. 25-40

⁴ Zainudin Hasan, Kolaborasi Antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi, *Jurnal Pendidikan Integritas*, vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 15-30

yang menyenangkan dan interaktif. Keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan ini akan membentuk sikap dan perilaku mereka di masa depan, menjadikan mereka agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.⁵

3. Penegakan Kebijakan dan Pengawasan

Guru dan staf karyawan juga bertanggung jawab dalam menegakkan kebijakan dan regulasi yang mendukung lingkungan sekolah yang bersih dari korupsi. Mereka harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, guru dan staf karyawan perlu melibatkan diri dalam pengawasan penggunaan dana sekolah, termasuk dana bantuan dari pemerintah atau sumbangan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan keuangan akan mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas semua pihak yang terlibat.⁶

4. Kerjasama dengan Manajemen Sekolah

Dukungan dari kepala sekolah dan pihak manajemen sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. Guru dan staf karyawan perlu menjalin kerjasama yang baik dengan manajemen untuk mengimplementasikan program-program pendidikan antikorupsi yang efektif. Manajemen harus menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan agar guru dan staf karyawan dapat melaksanakan inisiatif tersebut. Dengan adanya dukungan yang kuat, upaya menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi akan lebih mudah terwujud.

5. Membangun Budaya Sekolah yang Berintegritas

Akhirnya, guru dan staf karyawan berperan dalam membangun budaya sekolah yang berintegritas. Mereka harus menjadi teladan bagi siswa dalam hal kejujuran dan tanggung jawab. Dengan menunjukkan sikap integritas dalam tindakan sehari-hari, guru dan staf karyawan dapat menginspirasi siswa untuk melakukan hal yang sama. Budaya ini akan berkembang seiring dengan konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi di seluruh aspek kehidupan sekolah. Dengan demikian, lingkungan sekolah akan menjadi tempat yang bersih dan sehat, mendukung perkembangan karakter siswa yang positif dan integritas yang tinggi.⁷

Hambatan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan kebijakan pencegahan korupsi, dan bagaimana cara mengatasinya

Dalam upaya menerapkan kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah, terdapat beberapa hambatan yang sering dihadapi. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan korupsi di kalangan pendidik dan staf. Banyak dari mereka yang masih menganggap bahwa korupsi hanya terjadi di sektor publik atau bisnis, tanpa menyadari bahwa praktik tersebut juga bisa terjadi di lingkungan pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah perlu mengadakan pelatihan dan seminar yang menyeluruh mengenai nilai-nilai integritas dan dampak negatif korupsi. Melalui program edukasi yang berkelanjutan, diharapkan semua pihak dapat lebih memahami peran mereka dalam mencegah korupsi.

Selain itu, dukungan manajemen yang minim juga menjadi salah satu hambatan yang signifikan. Tanpa adanya komitmen dan dukungan dari kepala sekolah serta manajemen, upaya pencegahan korupsi sulit untuk diterapkan dengan efektif. Manajemen perlu menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam mempromosikan kebijakan antikorupsi. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan sistem reward bagi guru dan staf yang menunjukkan integritas, serta mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam visi dan misi sekolah. Dengan cara ini,

⁵ Suyanto, "Pendidikan Antikorupsi untuk Menumbuhkan Karakter Siswa," *Jurnal Pendidikan Karakter*, vol. 8, no. 1, 2017, pp. 43-54

⁶ Zainudin Hasan, Peran Guru dan Staf Karyawan dalam Penegakan Kebijakan Antikorupsi di Sekolah, *Jurnal Pendidikan dan Integritas*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 45-58).

⁷ Dewi, "Pengaruh Budaya Sekolah Berintegritas terhadap Perilaku Siswa," *Jurnal Pendidikan Karakter*, vol. 7, no. 2, 2019, pp. 91-100

diharapkan seluruh anggota sekolah dapat merasa termotivasi untuk mendukung kebijakan pencegahan korupsi.

Kebijakan yang tidak jelas atau ambigu juga sering menjadi penghambat. Banyak sekolah yang belum memiliki pedoman atau kebijakan spesifik yang mengatur mengenai pencegahan korupsi. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan di antara guru dan staf mengenai apa yang diharapkan dari mereka. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah untuk menyusun dan mensosialisasikan kebijakan pencegahan korupsi yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan. Dengan dokumen kebijakan yang baik, setiap individu di sekolah dapat memiliki pedoman yang jelas tentang tanggung jawab mereka dalam mencegah korupsi.⁸

Sumber daya yang terbatas sering kali menjadi tantangan lain dalam penerapan kebijakan ini. Sekolah sering kali menghadapi keterbatasan dana, fasilitas, dan tenaga pengajar untuk melaksanakan program pencegahan korupsi. Dalam hal ini, kolaborasi dengan pihak luar seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau komunitas lokal dapat menjadi solusi. Sekolah bisa mencari bantuan dana, pelatihan, atau sumber daya lainnya dari pihak-pihak tersebut untuk mendukung program pendidikan antikorupsi. Dengan demikian, sekolah dapat memaksimalkan potensi yang ada dan membuat upaya pencegahan korupsi lebih efektif.

Budaya sekolah yang tidak mendukung integritas juga dapat menghambat penerapan kebijakan pencegahan korupsi. Jika di lingkungan sekolah terdapat praktik-praktik yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa atau tidak ditindaklanjuti, maka akan sulit untuk menciptakan perubahan yang berarti. Oleh karena itu, sekolah perlu berusaha membangun budaya integritas yang kuat. Ini dapat dilakukan dengan mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan transparansi dalam setiap aktivitas sekolah. Misalnya, dengan melibatkan siswa dalam pengelolaan dana sekolah, mereka dapat belajar tentang tanggung jawab dan transparansi dalam keuangan.

Sistem pengawasan yang lemah dalam pengelolaan keuangan juga menjadi kendala yang signifikan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, penggunaan dana sekolah bisa disalahgunakan. Sekolah harus menerapkan sistem akuntabilitas yang jelas dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah melibatkan siswa dalam proses pengawasan keuangan, misalnya melalui pembentukan tim yang terdiri dari perwakilan siswa dan guru untuk memantau penggunaan dana. Dengan cara ini, siswa akan lebih memahami pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan.⁹

Kurangnya pelatihan bagi guru dan staf mengenai pencegahan korupsi juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Banyak pendidik yang tidak mendapatkan informasi atau pelatihan yang memadai tentang bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan program pelatihan yang relevan dan berkualitas bagi guru dan staf. Pelatihan ini harus mencakup teori serta praktik penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pendidik dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan juga merupakan tantangan yang harus dihadapi. Beberapa guru atau staf mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada dan enggan untuk mengadopsi kebijakan baru yang berkaitan dengan pencegahan korupsi. Untuk mengatasi hal ini, komunikasi yang baik sangat penting. Sekolah harus melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga mereka merasa memiliki andil dalam perubahan tersebut. Dengan demikian, rasa memiliki akan mengurangi resistensi dan meningkatkan dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan.

Keterbatasan waktu untuk pendidikan antikorupsi dalam kurikulum juga menjadi kendala. Banyak sekolah yang memiliki kurikulum yang padat, sehingga sulit untuk menyisipkan materi mengenai antikorupsi. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara kreatif dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam pelajaran yang sudah ada. Misalnya, guru

⁸ Wibowo, A. (2021). "Implementasi Kebijakan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 123-135

⁹ Suharto, R. & Rahmawati, E. (2021). "Peran Kolaborasi dalam Meningkatkan Efektivitas Program Antikorupsi di Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 10(3), 67-78.

bisa menyisipkan diskusi tentang korupsi dalam pelajaran sejarah atau ekonomi. Dengan cara ini, pendidikan antikorupsi dapat dilakukan tanpa mengorbankan waktu belajar untuk mata pelajaran lain. Terakhir, evaluasi dan pemantauan yang tidak memadai dapat menghambat keberhasilan kebijakan pencegahan korupsi. Tanpa adanya sistem evaluasi yang jelas, sulit untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan berhasil atau tidak. Sekolah perlu mengembangkan mekanisme evaluasi yang sistematis untuk memantau efektivitas program pencegahan korupsi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pihak sekolah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kebijakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan mengatasi berbagai hambatan ini secara komprehensif, diharapkan sekolah dapat menerapkan kebijakan pencegahan korupsi dengan lebih efektif, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas.¹⁰

III. KESIMPULAN

Pencegahan korupsi di lingkungan sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam dunia pendidikan. Sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter generasi muda. Dalam konteks ini, peran guru dan staf karyawan sangat krusial dalam menanamkan nilai-nilai integritas serta menciptakan budaya anti-korupsi di kalangan siswa. Dengan memberikan pendidikan antikorupsi yang efektif dan melibatkan semua elemen sekolah, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

Meskipun ada kesadaran akan pentingnya pencegahan korupsi, berbagai hambatan tetap menjadi tantangan dalam implementasinya. Salah satu masalah utama adalah rendahnya pemahaman di kalangan pendidik dan staf tentang peran mereka dalam mencegah korupsi. Banyak yang belum menyadari bahwa praktik-praktik tidak etis dapat muncul dalam lingkungan sekolah, seperti manipulasi data atau penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengadakan program pelatihan yang sistematis bagi guru dan staf karyawan, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai integritas dan dampak negatif dari korupsi, serta mampu menjadi teladan bagi siswa.

Selain itu, dukungan dari manajemen sekolah juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. Kebijakan dan regulasi yang jelas, serta sistem pengawasan yang efektif, harus diterapkan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan sumber daya sekolah. Dalam hal ini, kolaborasi antara guru, staf, dan manajemen perlu dijalin agar setiap langkah dalam pencegahan korupsi dapat dilaksanakan secara konsisten. Dengan adanya kerjasama yang baik, upaya menciptakan budaya integritas di sekolah akan lebih mudah terwujud.

Terakhir, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan korupsi. Sinergi yang baik antara ketiga pihak ini dapat meningkatkan efektivitas pendidikan antikorupsi di sekolah. Melalui partisipasi aktif orang tua dan masyarakat, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai integritas dan kejujuran. Dengan demikian, diharapkan upaya pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat membentuk generasi muda yang bersih dari praktik korupsi dan siap menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan.

IV. SARAN

Dalam upaya mencegah korupsi di lingkungan sekolah, penting untuk memprioritaskan pendidikan antikorupsi sebagai bagian integral dari kurikulum. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan guru dan staf dalam pelatihan tentang nilai-nilai integritas dan tanggung jawab. Dengan meningkatkan pemahaman mereka tentang dampak negatif korupsi, pendidik dapat lebih efektif dalam mengajarkan siswa tentang pentingnya kejujuran dan akuntabilitas. Selain itu, menciptakan inisiatif kreatif yang melibatkan siswa, seperti lomba, seminar, atau diskusi, dapat membantu menumbuhkan kesadaran dan sikap proaktif dalam pencegahan korupsi.

¹⁰ Sari, R. & Adi, P. (2022). "Resistensi terhadap Perubahan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus di Sekolah." *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 110-125.

Keterlibatan aktif siswa dalam berbagai kegiatan ini akan membentuk pola pikir dan perilaku mereka untuk menjadi agen perubahan di masa depan.

Selain itu, dukungan manajemen yang kuat sangat diperlukan untuk menerapkan kebijakan pencegahan korupsi secara efektif. Kepala sekolah dan manajemen harus berkomitmen untuk menyediakan sumber daya dan kebijakan yang jelas mengenai pencegahan korupsi, termasuk pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana sekolah. Dalam hal ini, transparansi dalam pengelolaan keuangan harus ditegakkan agar semua pihak merasa bertanggung jawab. Dengan membangun budaya integritas yang mendukung nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah, diharapkan tercipta suasana yang positif dan bersih dari praktik korupsi, serta menghasilkan generasi muda yang berintegritas dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Rina Oktaviani, Peran Guru dalam Membangun Karakter Siswa, *Jurnal Pendidik dan Pembelajaran*, vol. 5, no. 1, 2022, hlm. 55-70
- Zainudin Hasan, Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah: Membangun Kesadaran dan Integritas, *Jurnal Pendidikan dan Etika*, vol. 5, no. 2, 2023, hlm. 115-130
- Siti Aisyah dan Budi Santoso, Peran Kebijakan dan Inisiatif Kreatif dalam Pencegahan Korupsi di Sekolah, *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, vol. 10, no. 1, 2023, hlm. 25-40
- Zainudin Hasan, Kolaborasi Antara Sekolah, Orang Tua, dan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi, *Jurnal Pendidikan Integritas*, vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 15-30
- Suyanto, "Pendidikan Antikorupsi untuk Menumbuhkan Karakter Siswa," *Jurnal Pendidikan Karakter*, vol. 8, no. 1, 2017, pp. 43-54
- Zainudin Hasan, Peran Guru dan Staf Karyawan dalam Penegakan Kebijakan Antikorupsi di Sekolah, *Jurnal Pendidikan dan Integritas*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 45-58).
- Dewi, "Pengaruh Budaya Sekolah Berintegritas terhadap Perilaku Siswa," *Jurnal Pendidikan Karakter*, vol. 7, no. 2, 2019, pp. 91-100
- Wibowo, A. (2021). "Implementasi Kebijakan Antikorupsi di Lingkungan Sekolah: Tantangan dan Solusi." *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 8(2), 123-135
- Suharto, R. & Rahmawati, E. (2021). "Peran Kolaborasi dalam Meningkatkan Efektivitas Program Antikorupsi di Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 10(3), 67-78.
- Sari, R. & Adi, P. (2022). "Resistensi terhadap Perubahan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan: Studi Kasus di Sekolah." *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Pendidikan*, 14(2), 110-125.